

**ANALISIS RASIO PENDAPATAN PEMERINTAH
DAERAH PADA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA GORONTALO**

Oleh :

HERLIN Y.D ANTULI

E11.16.113

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS RASIO PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA GORONTALO

Oleh :

HERLIN Y.D ANTULI

E11.16.113

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2023

Pembimbing I



Rahma Rizal, SE, Ak., M.Si
NIDN. 0914027902

Pembimbing II



Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO PENDAPATAN PEMERINTAH
DAERAH PADA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA GORONTALO**

Oleh

HERLIN Y.D ANTULI

E.11.16.113

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

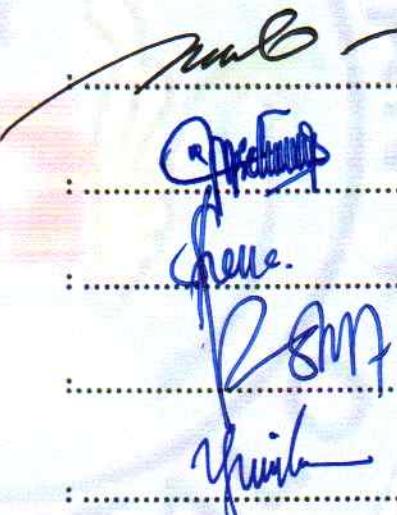
1. Dr.Bala Bakri, S.Ip.,S.Psi.,SE.,MM
(ketua Penguji)

2. Marina Paramitha S. Piola, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji)

3. Shella Budiawan, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji)

4. Rahma Rizal, SE.Ak.,M.Si
(Pembimbing Utama)

5. Rizka Yunika R, SE.,M.Ak
(Pembimbing Pendamping)


.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr.Musafir, SE.,M.Si
NIDN : 0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi



Shella Budiawan, SE., M.Ak
NIDN : 0921089202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesuanguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



HERLIN Y.D ANTULI
E11.16.113

MOTO DAN PERSEMPAHAN

“Siapa Yang Menempuh Jalan Untuk Menuntut Ilmu Maka Allah Mudahkan
Jalannya Menuju Surga”

“Pendidikan Memiliki Akar Yang Pahit, Tapi Buahnya Manis”

“Siapa Yang Menuntut Ilmu Dalam Jumlah Banyak Sekaligus, Maka Hilang Pula
Sejumlah Ilmu Darinya. Sesungguhnya Ilmu Itu Dicari Hanyalah Dengan Cara
Sedikit Demi Sedikit Bersama Berlalunya Siang Dan Malam”

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Sebagai Tanda Bakti Kepada Kedua Orang Tua
Yang Tiada Hentinya Memberikan Doa Dan Dukungan. Dan Semoga Semua
Kebaikan Keduanya Dibalas Oleh Allah SWT Dengan Yang Lebih Baik.

ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Gorontalo”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini. Penyusunan penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari kedua orang tua yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian ini maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Muhamad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Gaffar, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Ibu Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah

membimbing dan mengarahkan penulis selama mengerjakan penelitian ini. Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing hingga penelitian ini dapat selesai, Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama ini, serta teman-teman mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2016 yang tidak bisa sebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Gorontalo, Mei 2023

Penulis

ABSTRACT

HERLIN Y.D. ANTULI. E1116113. THE REVENUE RATIO ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT AT THE TOURISM, YOUTH, AND SPORTS OFFICE OF GORONTALO CITY

This research aims to 1) determine and analyze the revenue ratios of regional government, namely Revenue Variance Analysis or Difference Analysis at the Tourism, Youth, and Sports Office of Gorontalo City, 2) know and analyze the revenue ratio of regional government, namely Regional Original Revenue Effectiveness Ratio at the Tourism, Youth, and Sports Office of Gorontalo City, and 3) find and analyze the revenue ratio of regional government, namely Regional Expenditure Efficiency Ratio at the Tourism, Youth, and Sports Office of Gorontalo City. The method used in this research is a qualitative descriptive method, namely how the revenue ratio values are analyzed based on the financial reports of the Tourism, Youth, and Sports Office of Gorontalo City from 2020-2022. The research results show that the revenue variance ratio in the last three years, namely 2020-2022, implies a poor criterion, namely 88% in 2020, 101% in 2021, and 93% in 2022. The effectiveness ratio in the last three years indicates a less effective criterion, namely 96% in 2020, 114% in 2021, and 78% in 2022. The efficiency ratio in the last three years shows a less efficient criterion, namely 100% in 2020, 98% in 2021, and 126% in 2022.

Keywords: revenue variance, effectiveness, efficiency



ABSTRAK

HERLIN Y.D ANTULI. E1116113. ANALISIS RASIO PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi; Analisis Varians Pendapatan atau Analisis Selisih pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo, 2) mengetahui dan menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo, dan 3) mengetahui dan menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi Rasio Efisiensi Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bagaimana nilai rasio pendapatan dilihat dari laporan keuangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Gorontalo dari tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio varians pendapatan dalam tiga tahun terakhir yaitu 2020-2022 termasuk dalam kriteria yang kurang baik dimana pada tahun 2020 sebesar 88%, pada tahun 2021 sebesar 101%, dan pada tahun 2022 sebesar 93%. Untuk rasio efektivitas dalam tiga tahun terakhir termasuk dalam kriteria yang kurang efektif, dimana pada tahun 2020 sebesar 96%, tahun 2021 sebesar 114% dan tahun 2022 sebesar 78%. Serta rasio efisiensi dalam tiga tahun terakhir juga termasuk dalam kriteria yang kurang efisien dimana pada tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 98% dan tahun 2022 sebesar 126%.

Kata kunci: varians pendapatan, efektivitas, efisiensi



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Definisi Kinerja.....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2.1.3 Pengertian Otonomi Daerah.....	12
2.1.4 Asas-asas Otonomi Daerah	14
2.1.5 Tujuan Otonomi Daerah.....	15
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.7 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.1.8 Kriteria Dan Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	19
2.1.9 Informasi Yang Digunakan	21
2.1.10 Akuntansi Sektor Publik	22

2.1.11	Akuntansi Pemerintah	23
2.1.12	Perkembangan Akuntansi Pemerintahan.....	24
2.1.13	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.1.14	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	29
2.1.15	Teknik Analisis Laporan Keuangan	30
2.1.16	Analisis Pendapatan.....	31
2.1.17	Penelitian Terdahulu	34
2.2	Kerangka Pemikiran	36

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.	Objek Penelitian	37
3.2.	Metode Penelitian Yang Digunakan	37
3.2.1	Desain Penelitian	37
3.2.2	Operasionalisasi Variabel	37
3.2.3	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.5	Metode Analisis Data.....	39

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1	Profil Lokasi Penelitian.....	42
4.1.2	Visi dan Misi	43
4.2	Hasil Penelitian	44
4.2.1	Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan.....	44
4.2.2	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46
4.2.3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	47
4.3	Pembahasan	49
4.3.1	Pembahasan Rasio Analisis Varians Anggaran Pendapatan ..	49
4.3.2	Pembahasan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	52
4.3.3	Pembahasan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	4
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 <i>Trend Varians Anggaran Pendapatan</i>	45
Grafik 4.2 <i>Trend Rasio Efektivitas</i>	47
Grafik 4.3 <i>Trend Rasio Efisiensi.....</i>	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi ini adalah suatu yang tidak bisa masyarakat yang ada diseluruh dunia hindari. Bangsa Indonesia adalah sebagian kecil dari masyarakat luas yang ada diseluruh dunia yang mempunyai kewajiban untuk memberikan partisipasinya dalam memperoleh pemerintahan yang sangat baik guna untuk menunjang persaingan diera global pada saat ini.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Mahsun (2006:26) menjelaskan bahwa meningkatnya kesadaran dalam bermasyarakat kepada penyelenggaraan administrasi disuatu publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran

ini bisa melihat seberapa jauh kinerja pemerintah untuk menghasilkan suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa varians rasio. Namun pada penelitian ini penulis berfokus pada analisis varians pendapatan. Varians pendapatan atau biasa disebut juga dengan analisis selisih menurut Mulyadi (2016) adalah selisih anggaran yang menunjukkan perbedaan antara biaya yang dikeluarkan sesungguhnya terjadi dengan taksiran yang seharusnya dikeluarkan menurut target anggaran yang ditetapkan.

Wahyu, (2015) memberikan pendapat Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan/penerimaan Pemda dengan estimasi.

Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran menurut Mahmudi (2016), dapat di lakukan dengan menggunakan analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis pendapatan bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang diterimanya. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang besar berarti daerah tidak lagi tergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat. Analisis belanja dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Sedangkan analisis pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yang telah dikelola.

Penelitian dalam menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah dilakukan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo dengan meninjau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Sedangkan anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan dan analisis belanja.

Berikut disajikan komponen-komponen singkat yang terdapat pada laporan realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo yang menjadi tempat penelitian pada penelitian ini.

**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo
Periode 2019 sampai dengan 2022**

URAIAN	ANGGARAN				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
PAD	234.085.938.965,00	246.960.765.850	260.847.905.850,00	286.498.283.357,00	217.583.653.390,81	237.696.699.749,55	297.332.050.502,77	224.834.013.158,28
Belanja	1.079.322.524.351,64	1.071.083.872.225	1.294.959.304.196,00	1.331.862.165.359,00	976.678.319.388,31	935.231.843.561,50	1.017.843.037.745,34	1.158.115.117.533,21
Belanja Langsung	1.078.822.524.351,64	1.069.583.872.225	1.291.299.839.482	1.329.819.976.525	976.678.319.388,31	922.549.178.350,5	1.017.495.137.753,34	1.157.747.267.533,21
Belanja Tdk Langsung	500.000.000	1.500.000.000,00	3.659.464.714,00	2.042.188.834,00	-	12.682.665.211,00	347.899.992,00	67.850.000,00
Belanja Modal	117.275.225.601,00	127.832.268.879,88	304.181.738.359,04	338.021.558.165,00	96.548.695.706,31	70.972.297.124,00	108.777.235.179,00	228.489.734.420,00

Sumber: LRA Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo mengalami peningkatan ditahun 2019, 2020 dan 2021, namun ditahun 2022 pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Dengan penjelasan bahwa ditahun 2019 anggaran PAD berjumlah Rp. 234.085.938.965 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 217.583.653.390,81. Ditahun 2020 anggaran PAD berjumlah Rp. 246.960.765.850 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 237.696.699.749,55. Ditahun 2021 anggaran PAD sejumlah Rp. 260.847.905.850 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 297.332.050.502,77 dan ditahun 2022 anggaran PAD yang ditetapkan sebesar Rp. 286.498.283.357 namun anggaran yang ditetapkan tersebut tidak mencapai target dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 224.834.013.158,28.

Kemudian untuk belanja derah dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan penjelasan bahwa ditahun 2019 anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 1.079.322.524.351,64 dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 976.678.319.388,31. Ditahun 2020 anggaran belanja sebesar Rp. 1.071.083.872.225 dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 935.231.843.561,50. Ditahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp. 1.294.959.304.196 dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 1.017.843.037.745,34. Dan ditahun 2022 anggaran belanja sebesar Rp. 1.331.862.165.359 dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 1.158.115.117.533,21.

Komponen belanja langsung dalam empat tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, dengan penjelasan bahwa ditahun 2019 anggaran belanja langsung yang ditetapkan sebesar Rp. 1.078.822.524.351,64 dan yang terrealisasi hanya sebesar

Rp. 976.678.319.388,31. ditahun 2020 anggaran belanja langsung yang ditetapkan sebesar Rp. 1.069.583.872.225 dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 922.549.178.350,5. ditahun 2021 anggaran belanja langsung yang ditetapkan sebesar Rp. 1.291.299.839.482 dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 1.017.495.137.753,34. ditahun 2022 anggaran belanja langsung yang ditetapkan sebesar Rp. 1.329.819.976.525 dan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 1.157.747.267.533,21.

komponen belanja tidak langsung ditahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000 namun tidak terdapat belaja tidak langsung yang terrealisasi. Ditahun 2020 belanja tidak langsng yang dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 12.682.665.211. Ditahun 2021 belanja tidak langsng yang dianggarkan sebesar Rp. 3.659.464.714 dan yang terrealisasi sebesar Rp347.899.992. Ditahun 2022 belanja tidak langsng yang dianggarkan sebesar Rp. 2.042.188.834 dan yang terrealisasi sebesar Rp. 67.850.000.

Sementara untuk komponen belanja modal dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan penjelasan bahwa ditahun 2019 belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 117.275.225.601 namun yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 96.548.695.706,31. Ditahun 2020 belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 127.832.268.879,88 namun yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 70.972.297.124. Ditahun 2021 belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 304.181.738.359,04 namun yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 108.777.235.179. Ditahun 2022 belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 338.021.558.165 namun yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 228.489.734.420.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian Analisis Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian Analisis Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi; Analisis Varians Pendapatan atau Analisis Selisih pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo?
2. Bagaimana analisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo?
3. Bagaimana analisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi Rasio Efisiensi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi; Analisis Varians Pendapatan atau Analisis Selisih pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah yang meliputi Rasio Efisiensi Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Bagi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penulis selanjutnya terutama mengenai Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah.

2) Manfaat Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo sebagai lokasi penelitian dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Kinerja

Secara etimologis, kinerja berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Mahsun (2006:25), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Sujarweni (2015:107) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Wibowo (2015:2). Kinerja diharapkan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik serta jumlah pekerjaan yang sesuai dengan standar. Penerapan kinerja karyawan dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan lebih efektif.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Wibowo (2006:78) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Menurut Sumarjo (2010) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan dengan memperhatikan keluaran dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Pemerintah merupakan suatu organisasi penyelenggara pembangunan wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pelayanan publik yang diberikan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat

dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

2.1.3 Pengertian Otonomi Daerah

Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintahan pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi ataskeberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah Menurut Bastian (2006):

- 1) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah riel, sehingga pendapatan per kapita akan terdorong.
- 2) Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing maupun domestik.
- 3) Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.
- 4) Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Suparmoko dalam Baihaqi (2011) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mangatur, mengukur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.4 Asas-asas Otonomi Daerah

Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 4) Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagaimana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sehingga dapat disimpulkan ada beberapa asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, tugas pembantu, dan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

2.1.5 Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Suparmoko (2001:18) yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah:

- 1) Memberdayakan masyarakat
- 2) Membuduhkan prakarsa dan keratifitas
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat
- 4) Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- 1) Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, tujuan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009) PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli

daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.7 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Adisasmita dan Rahardjo (2014) pajak daerah adalah iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi kepada daerah, digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Adisasmita (2011) retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat, dengan demikian ciri pokok retribusi adalah sebagai berikut:

- a) Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- b) Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.
- c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan retribusi daerah adalah pemungutan yang dilakukan berhubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Bawono dan Novelsyah (2012), merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pengelolaan APBD. Jika ada laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari penyertaan modal pemerintah, hal tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Adisasmita (2011:119), yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Sehingga dapat disimpulkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik daerah.

4) Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Lain-lain PAD yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll Menurut Novalistia dan Rizka (2016), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu, PAD, bagian hasil pajak dan bukan pajak serta bagian sumbangan dan bantuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari lainlain milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

2.1.8 Kriteria Dan Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986:99).

1) Kemampuan struktur organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas - tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4) Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.

2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sedangkan Halim (2007:230) menjelaskan bahwa pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.9 Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan

Adapun informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut; Informasi FinansialPenilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual/realisasi dengan yang dianggarkan.

Analisis varians secara garis besar :

- a. Varians pendapatan (*revenue variance*)
- b. Varians Pengeluaran/Belanja (*expenditure variance*), yang terdiri dari ;Varian belanja rutin (*recurrent expenditure variance*), dan Varian belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*).
- c. Setelah analisis varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut (apa, siapa/bagian mana, kenapa dan bagaimana). Keterbatasan analisis varians adalah kesulitan menetapkan besarnya batasan varians.

2.1.10 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik pada saat masih memiliki kaitan erat dengan penerapan akuntansi dan perlakuan akuntansi di wilayah publik. Akuntansi sektor publik menurut teori yang dikemukakan oleh Bastian (2010:3) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Bastian (2010:3) menambahkan akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknikatau analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu

(politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Dari definisi di atas tentang akuntansi sektor publik dapat dinyatakan sebagai sebuah kegiatan jasa yang aktivitas tersebut berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah (government), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

2.1.11 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang baru berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (public

finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Menurut Baswir (2000:7), akuntansi pemerintahan (umumnya termasuk dalam akuntansi untuk lembaga non profit) merupakan organisasi bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Bachtiar (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

2.1.12 Perkembangan Akuntansi Pemerintahan

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan single entry. Menurut Halim (2004) dalam Tanjung (2012) sistem pencatatan single entry atau pencatatan tunggal ini adalah pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat

di sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 khususnya pada pasal 30, 31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertangungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2.1.13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Menurut Mahmudi (2016) jenis-jenis laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi : 1) Neraca, 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 3) Laporan Arus Kas, 4) Catatan atas laporan keuangan (CaLK), 5) Lampiran laporan keuangan BUMD.

Dari lima jenis laporan tersebut biasanya yang dipublikasikan di media massa hanya tiga laporan utama yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas.

Untuk lebih jelasnya maka berikut ini disajikan elemen-elemen dari laporan keuangan tersebut:

1). Elemen Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening. Setiap rekening dirinci hingga level rincian objek. Penyajian di laporan keuangan publikasian biasanya cukup ditampilkan rekening utama dan sebrekening satu level dibawahnya.

2) Elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas empat pos utama yaitu;

a). Pendapatan. Pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu :

i) Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri atas : 1) Pendapatan pajak daerah, 2) Pendapatan retribusi daerah, 3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain PAD yang sah.

ii) Pendapatan Transfer. Pendapatan transfer meliputi; 1) transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana

olokasi khusus, 2) transfer pemerintah pusat lainnya (dana otonomi khusus, dana alokasi khusus, 3) transfer pemerintah provensi khusus untuk pemerintah kabupaten dan kota yaitu pendapatan bagi hasil pajak, dan dana penyesuaian.

iii) Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi; 1) pendapatan hibah,

b). Belanja. Pos belanja terdiri atas tiga komponen yaitu :

i) Belanja Operasi. Belanja operasi meliputi; 1) belanja pegawai, 2) belanja barang, 3) bunga, 4) subsidi, 5) hibah, 6) bantuan sosial.

ii) Belanja Modal. Belanja modal meliputi; 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja gedung dan bangunan, 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya, 6) belanja aset lainnya.

iii) Belanja Tak Terduga. Belanja tak terduga atau belanja lain-lain merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang atau rutin terjadi. Belanja tak terduga dapat berupa : 1) bantuan bencana alam, 2) bantuan bencana sosial, 3) bantuan korban politik.

c) Transfer. Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa transfer bagi hasil pendapatan ke kabupaten kota, meliputi; bagi hasil pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota.

- d) Surplus / (Defisit). Selisih antara pendapatan dan belanja di catat dalam pos surplus atau (defisit). Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dana belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.
- e) Pembiayaan. Pembiayaan dikategorikan menjadi dua yaitu; 1) penerimaan pembiayaan dan 2) pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran di catat dalam pos pembiayaan netto.
- f) SILPA / SIKPA. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran.

3) Elemen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama yaitu ; 1) arus kas dari aktivitas operasi, 2) arus kas dari aktivitas investasi, 3) arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan 4) arus kas dari aktivitas non anggaran. dari masing-masing aktivitas tersebut di pilah lagi menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar sehingga di peroleh arus kas bersih dari setiap aktivitas.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, laporan realisasi anggaran, maupun laporan arus kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. CaLK

menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuasa BUD untuk menyiapkannya.

2.1.14 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Menurut Halim (2007) pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah adalah :

- 1) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 2) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Menurut Mahmudi (2016) analisis kinerja keuangan di lakukan dengan cara menganalisis setiap elemen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu di analisis untuk dapat memberikan gambaran kinerja keuangan. analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam

laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

2.1.15 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016) analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan yaitu :

1) Analisis Varians (Selisih)

Analisis varians pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang perlu dianalisis lebih dalam adalah terhadap selisih yang tidak menyenangkan.

2) Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Contoh analisis rasio keuangan yaitu; analisis aset, analisis likuiditas, solvabilitas, ekuitas, dll.

3) Analisis Pertumbungan (Trend)

Analisis pertumbungan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Analisis pertumbuhan atau trend dapat diaplikasikan misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus, defisit dll.

4) Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah.

5) Analisis Prediksi

Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar prediksi.

2.1.16 Analisis Pendapatan

Menurut Mahmudi (2016) secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis terhadap pendapatan dengan cara:

1) Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisai pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya (Mahmudi, 2016). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin Tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik dengan menggunakan kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas PAD

Kriteria	Persentasi Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	>100
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : Mahmudi 2016

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Menurut Halim (2016) rasio efisiensi merupakan rasio yang menjelaskan perbandingan antar besar biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan penerimaan bersama realiasasi pendapatan yang akan di terima. Kinerja pemerintah daerah di katakan efisien apabila mendapatkan nilai rasio di bawah dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Makin rendah nilai rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin membaik. Oleh sebab itu pemerintahan diperlukan perhitungan yang terfokus untuk mengetahui besaran biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan realisasi yang besar agar dapat diketahui kegiatan peningkatan pendapatan yang dilakukan sudah efisien ataukah belum. Formula yang di gunakan untuk menghitung rasio adalah :

$$\text{Rasi Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Reaisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan konsep diatas, maka dapat dirumuskan hasil rekapitulasi analisis Laporan Kinerja dengan menggunakan rasio-rasio tersebut diatas, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Analisis Laporan Kinerja

No	Analisis	Ukuran	Kriteria
1.	Analisis Varians Pendapatan	Meningkat	Baik
2.	Efektivitas PAD	>100%	Sangat Efektif
3.	Efisiensi	<100%	Sangat Efisien

. Sumber : Mahmudi 2016

2.1.17 Penelitian Terdahulu

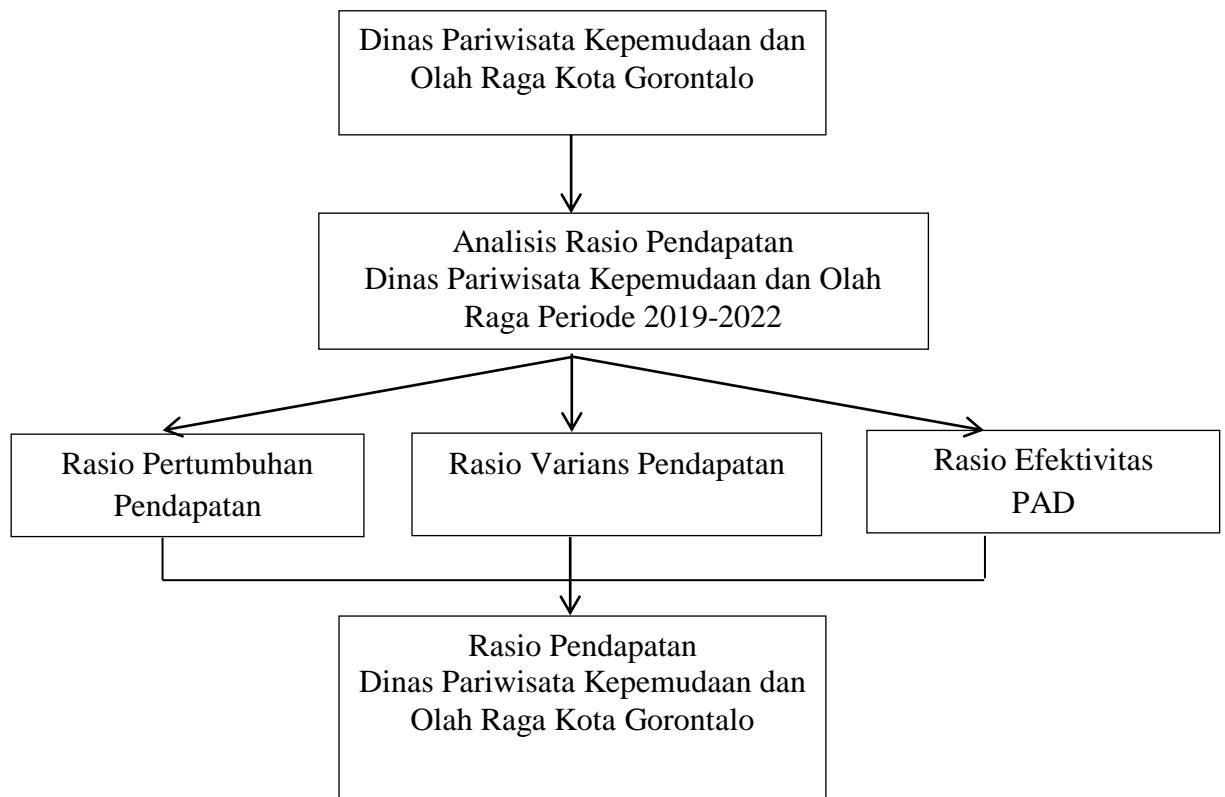
Berikut dijabarkan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Wita Liantino, 2018. Judul penelitian Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa Kinerja Keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif (2) Rasio Efektifitas PAD efektifitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluaskan sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan. (4) Rasio Aktifitas/rasio keserasian dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah

- tersebut. (5) Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kota Surakarta. Sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta memperbaiki 4 rasio yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan.
2. Juddy Julian Pilat dan Jenny Morasa, 2017. Judul Penelitian Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015. Berdasarkan perhitungan dan analisis Keuangan Daerah Kinerja dapat disimpulkan bahwa pola hubungan tingkat otonomi daerah di Kota Manado adalah kriteria instruktif. Tingkat Desentralisasi Fiskal masih kurang, tetapi Rasio Efektivitas sangat efektif dan Rasio Efisiensi juga sangat efisien. Rasio Pengeluaran Kongruensi menunjukkan keseimbangan antar pengeluaran tidak seimbang. Berdasarkan perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat Disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Manado masih belum ideal. Bagikan dan Hasil perhitungan pertumbuhan, posisi Kota Manado berada di kuadran II dan Keuangan Indeks Kemampuan Kota Manado tinggi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dibawah ini adalah gambaran kerangka pemikiran yaitu:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian adalah Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo.

3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu bagaimana nilai rasio pendapatan dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

3.2.2 Operasional Variabel

Untuk menemukan data apa yang di perlukan, maka terlebih dahulu perlu menjelaskan definisi operasional indikator yang di gunakan dalam penelitian ini. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa dalam menganalisis rasio pendapatan Pemerintah, kita perlu menganalisis kinerja dengan menggunakan alat ukur berupa rasio. Adapun rasio-rasio yang digunakan alat ukur untuk analisis kinerja keuangan pemerintah terdiri atas: Rasio Varians Pendapatan, Rasio

Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Efektivitas PAD. Maka dari itu, penelitian ini dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Rumus	Skala
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis Pendapatan		
	1) Rasio Varians Pendapatan	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } x}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } x} \times 100\%$	Rasio
	2) Rasio Efektivitas PAD	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD Yang Ditetapkan}} \times 100\%$	Rasio
	3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio

Sumber :Mahmudi, 2016

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

3.2.3.1 Jenis Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka, yang umumnya diperoleh dari hasil wawan cara dengan pihak-pihak yang terkait pada menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, baik itu laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran.

3.2.3.2 Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Gorontalo berupa data hasil wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini,

seperti pimpinan serta karyawan. Data sekunder diperlukan dengan tujuan melengkapi data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar-standar dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan data keungan, baik laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti laporan realisasi anggaran.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi yaitu mengamati hal-hal yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.
- 2) Interview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- 3) Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui pencatatan dari berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen tersebut seperti Laporan Realisasi anggaran.

3.2.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis yang digunakan untuk pengujian kinerja keuangan yaitu rasio keuangan yang berhubungan dengan kinerja rasio pendapatan pemerintah. Adapun data yang dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 3 (tiga) tahun

terakhir, yakni tahun 2020, 2021 dan 2022. Langkah-langkah dalam menganalisis rasio pendapatan pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data-data keuangan sehubungan dengan data yang dibutuhkan dalam rasio yang digunakan. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Mengelompokan data-data keuangan sesuai yang tercantum dalam rumus rasio yang digunakan, dalam bentuk tabel.
- 3) Perhitungan nilai rasio kinerja keuangan pemerintah untuk tiga tahun terakhir dengan menggunakan rumus:

- a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

- b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah

ditetapkan setiap awal tahunnya (Mahmudi, 2016). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Menurut Halim (2016) rasio efisiensi merupakan rasio yang menjelaskan perbandingan antar besar biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan penerimaan bersama realiasasi pendapatan yang akan di terima. Kinerja pemerintah daerah di katakan efisien apabila mendapatkan nilai rasio di bawah dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Makin rendah nilai rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin membaik. Oleh sebab itu pemerintahan diperlukan perhitungan yang terfokus untuk mengetahui besaran biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan realisasi yang besar agar dapat diketahui kegiatan peningkatan pendapatan yang dilakukan sudah efisien ataukah belum. Formula yang di gunakan untuk menghitung rasio adalah :

$$\text{Rasi Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Reaisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Lokasi Penelitian

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo terletak di jln. Drs. Achmad Nadjamudin No. 160 kelurahan limba U II kecamatan kota selatan kota gorontalo no. telepon (0435) 822579. Pada tahun 1992 dinas pariwisata pertama dibentuk berdasarkan PERDA tahun 1992. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta peratura daerah No. 10 tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 maka kantor pariwisata berubah kembali menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo dan kemudian pada Tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah kembali menjadi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang Mempunyai tugas melaksanakan untuk memantau dan melindungi obyek obyek wisata yang ada baik dari segi obyek wisata agama, wisata alam maupun wisata sejarah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Gorontalo juga bertugas untuk dapat mempromosikan semua jenis wisata yang ada di Kota Gorontalo kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing agar dapat menambah nilai jual meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wilayah Kota Gorontalo, Gorontalo memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kota Gorontalo dalam bidang budaya dan pariwisata berdasarkan asas otonomi daerahnya.

Melalui kantor Dinas pariwisata dan kebudayaan atau yang disingkat Disparbud ini, berbagai urusan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan. Adapun tugas Disparbud adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya. Fungsi Disparbud ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya.

4.1.2 Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi

Terselenggaranya layanan prima pemerintah Kota Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maju, aktif, religius dan terdidik.

4.1.2.2 Misi

1. Reformasi birokrasi
2. Ketersediaan infrastruktur
3. Peningkatan fungsi dan peran UMKM
4. Akses layanan pendidikan dan kesehatan terjangkau dan bermutu
5. Lestarinya nilai-nilai religius dan kultur masyarakat yang beradat
6. Kualitas SDM meningkat

4.2 Hasil Penelitian

Berikut ini adalah data atau perkiraan-perkiraan yang relevan terhadap rasio keuangan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Table 4.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo
Periode 2019 sampai dengan 2022

URAIAN	ANGGARAN				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
PAD	234.085.938.965,00	246.960.765.850	260.847.905.850,00	286.498.283.357,00	217.583.653.390,81	237.696.699.749,55	297.332.050.502,77	224.834.013.158,28
Belanja	1.079.322.524.351,64	1.071.083.872.225	1.294.959.304.196,00	1.331.862.165.359,00	976.678.319.388,31	935.231.843.561,50	1.017.843.037.745,34	1.158.115.117.533,21
Belanja Langsung	1.078.822.524.351,64	1.069.583.872.225	1.291.299.839.482	1.329.819.976.525	976.678.319.388,31	922.549.178.350,5	1.017.495.137.753,34	1.157.747.267.533,21
Belanja Tdk Langsung	500.000.000	1.500.000.000,00	3.659.464.714,00	2.042.188.834,00	-	12.682.665.211,00	347.899.992,00	67.850.000,00
Belanja Modal	117.275.225.601,00	127.832.268.879,88	304.181.738.359,04	338.021.558.165,00	96.548.695.706,31	70.972.297.124,00	108.777.235.179,00	228.489.734.420,00

4.2.1 Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisai pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

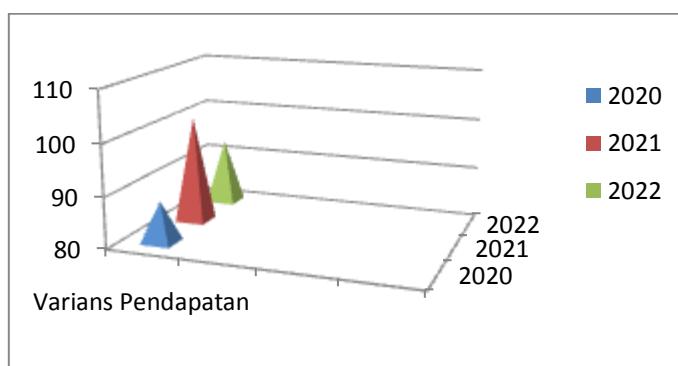
$$\text{Tahun 2020} = \frac{929.470.743.642,55}{1.046.354.690.850} \times 100\% = 0,88 \text{ atau } 88\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.035.735.042.324,77}{1.026.743.414.850} \times 100\% = 1,01 \text{ atau } 101\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{915.889.751.815,28}{979.238.977.357} \times 100\% = 0,93 \text{ atau } 93\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio varians anggaran pendapatan diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 88%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja pendapatan sebesar 88% dari anggaran yang ditetapkan. Ditahun 2021 nilai rasio mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi seniai 101%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja pendapatan sebesar 101% dari anggaran yang ditetapkan. Dan ditahun 2022 rasio yang diperoleh mengalami penurunan menjadi sebesar 93% artinya pemerintah daerah memiliki kinerja pendapatan sebesar 93% dari anggaran yang ditetapkan.

Trend tersebut jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 4.1
Trend Varians Anggaran Pendapatan
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo

Dengan memperhatikan grafik rasio varians anggaran pendapatan di atas, maka dapat diketahui bahwa *trend* rasio varians anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo telah menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Dimana pada tahun 2020 senilai 88%, tahun 2021 meningkat menjadi seniai 101% dan ditahun 2022 senilai 93%.

4.2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya (Mahmudi, 2016). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{237.696.699.749,55}{246.960.765.850} \times 100\% = 0,96 \text{ atau } 96\%$$

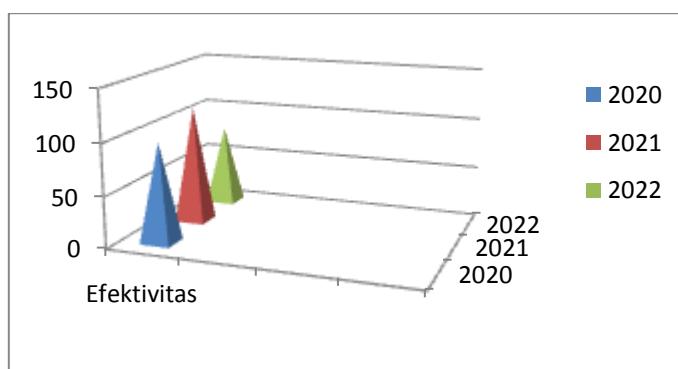
$$\text{Tahun 2021} = \frac{297.332.050.502,77}{260.847.905.850} \times 100\% = 1,14 \text{ atau } 114\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{224.834.013.158,28}{286.498.283.357} \times 100\% = 0,78 \text{ atau } 78\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 96%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja efektifitas pelaksanaan anggaran yang kurang efektif, seanjutnya ditahun 2021 nilai rasio mengalami peningkatan menjadi 114% artinya artinya pemerintah

daerah memiliki kinerja efektifitas pelaksanaan anggaran yang sangat efektif, dan ditahun 2022 nilai rasio kembali mengalami penurunan menjadi 78% artinya pemerintah daerah memiliki kinerja efektifitas pelaksanaan anggaran yang kurang efektif. Sebagaimana dikatakan bahwa standar rasio efektivitas pemerintah daerah dikatakan baik apabila memiliki nilai rasio diatas 100%.

Trend tersebut jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 4.1
Trend Rasio Efektivitas
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo

Dengan memperhatikan grafik rasio efektivitas di atas, maka dapat diketahui bahwa *trend* rasio efektivitas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo telah menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Dimana pada tahun 2020 senilai 96%, tahun 2021 meningkat menjadi senilai 114% dan ditahun 2022 senilai 78%.

4.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2016) rasio efisiensi merupakan rasio yang menjelaskan perbandingan antara besar biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan penerimaan bersama realiasi pendapatan yang akan di terima. Kinerja

pemerintah daerah di katakan efisien apabila mendapatkan nilai rasio di bawah dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Makin rendah nilai rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin membaik. Oleh sebab itu pemerintahan diperlukan perhitungan yang terfokus untuk mengetahui besaran biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan realisasi yang besar agar dapat diketahui kegiatan peningkatan pendapatan yang dilakukan sudah efisien ataukah belum. Formula yang di gunakan untuk menghitung rasio adalah :

$$\text{Rasi Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

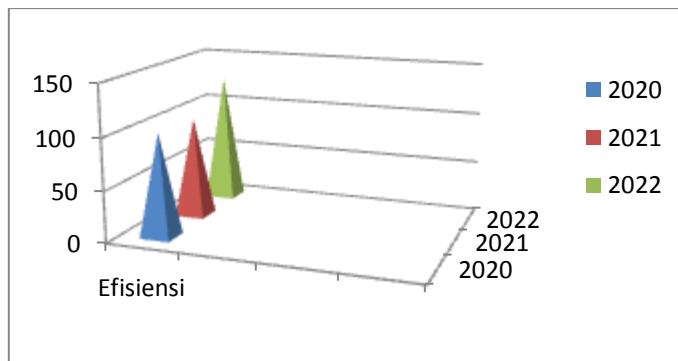
$$2020 = \frac{935.231.843.561,50}{929.470.743.642,55} \times 100\% = 1,00 \text{ atau } 100\%$$

$$2021 = \frac{1.017.843.037.745,34}{1.035.735.042.324,77} \times 100\% = 0,98 \text{ atau } 98\%$$

$$2022 = \frac{1.158.115.117.533,21}{1.035.735.042.324,77} \times 100\% = 1,26 \text{ atau } 126\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 100%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja efisien yang berimbang, seanjutnya ditahun 2021 nilai rasio mengalami penurunan menjadi 98% artinya kinerja anggaran belanja pemerintah daerah dinilai efisien karena berada dibawah 100%, namun ditahun 2022 nilai rasio mengalami peningkatan menjadi 126% artinya kinerja anggaran belanja pemerintah daerah dinilai kurang efisien karena berada jauh diatas 100%.

Trend tersebut jika digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 4.1
Trend Rasio Efisiensi
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo

Dengan memperhatikan grafik rasio efisiensi di atas, maka dapat diketahui bahwa *trend* rasio efisiensi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo telah menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Dimana pada tahun 2020 senilai 100%, tahun 2021 mengalami penurunan nilai rasio 98% dan ditahun 2022 nilai rasio kembali meningkat menjadi senilai 126%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Rasio Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian tentang rasio analisis varians (selisih) anggaran pendapatan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo tahun 2020, ditemukan bahwa nilai rasio sebesar 88%. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 929.470.743.642,55 dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 1.046.354.690.850.

Pada umumnya, standar rasio yang mengukur kinerja pendapatan pemerintah daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dianggap memiliki

kinerja pendapatan yang baik jika realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan berada di bawah jumlah yang dianggarkan, maka kinerja dinilai kurang baik.

Dalam kasus Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2020, anggaran yang ditetapkan ternyata melebihi realisasi yang diterima, sehingga rasio pendapatan sebesar 88% ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dinilai kurang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas tersebut tidak mampu mencapai target pendapatan yang telah dianggarkan, dan ada defisit dalam pencapaian pendapatan. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendapatan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab defisit tersebut dan merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan agar realisasi pendapatan dapat lebih mendekati atau bahkan melebihi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam nilai rasio analisis varians (selisih) anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo. Nilai rasio ini meningkat menjadi 101%, yang artinya pemerintah daerah berhasil mencapai kinerja pendapatan sebesar 101% dari anggaran yang telah ditetapkan. Peningkatan nilai rasio ini bisa dijelaskan oleh beberapa faktor.

Pertama, terdapat peningkatan realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan meningkat dari Rp. 929.470.743.642,55 menjadi Rp. 1.035.735.042.324,77. Ini menunjukkan bahwa Dinas berhasil

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada, seperti pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, sehingga pendapatan yang diterima melebihi prediksi sebelumnya. Kedua, terjadi penurunan anggaran pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan daerah turun dari Rp. 1.046.354.690.850 menjadi Rp. 1.026.743.414.850. Meskipun anggaran pendapatan daerah menurun, realisasi pendapatan tetap meningkat, menunjukkan bahwa Dinas dapat mengelola pendapatan dengan lebih efisien.

Berdasarkan standar rasio yang umumnya digunakan, pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja pendapatan yang baik jika realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2021 telah mencapai kinerja pendapatan yang sangat baik karena realisasi pendapatan melebihi anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Dinas untuk meningkatkan pendapatan telah berhasil, dan dapat menjadi contoh bagi unit-unit pemerintah lainnya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, Dinas ini dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan dan penyediaan layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam nilai rasio analisis varians (selisih) anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo. Nilai rasio ini mengalami penurunan menjadi 93%, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berhasil mencapai kinerja pendapatan sebesar 93% dari anggaran yang telah ditetapkan. Penurunan nilai rasio ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor.

Pertama, terdapat penurunan drastis pada realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan mengalami penurunan yang signifikan, turun dari Rp. 1.035.735.042.324,77 menjadi Rp. 915.889.751.815,28. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti dampak dari perubahan kondisi ekonomi, pandemi, atau perubahan kebijakan perpajakan yang memengaruhi pendapatan daerah. Kedua, terjadi penurunan anggaran pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan daerah juga turun dari Rp. 1.026.743.414.850 menjadi Rp. 979.238.977.357. Meskipun anggaran pendapatan daerah turun, penurunan realisasi pendapatan lebih besar, sehingga menyebabkan nilai rasio menjadi 93%.

Berdasarkan standar rasio yang umumnya digunakan, pemerintah daerah dianggap memiliki kinerja pendapatan yang baik jika realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2022 masih dinilai memiliki kinerja pendapatan yang kurang baik karena realisasi pendapatan sangat jauh di bawah anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi tantangan ini, Dinas perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan pendapatan yang signifikan dan merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan. Upaya perbaikan dapat mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan, diversifikasi sumber-sumber pendapatan, dan penyesuaian anggaran sesuai dengan realitas ekonomi dan kondisi saat itu. Langkah-langkah ini dapat

membantu Dinas meningkatkan kinerja pendapatan dan menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Hasil penelitian ini jika sama dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2016) yang mengatakan bahwa analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan maka hal itu dinilai kurang baik.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wita Liantino, 2018. Dengan djudul penelitian Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa Kinerja Keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif (2) Rasio Efektifitas PAD efektifitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluaskan sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan.

4.3.2 Pembahasan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian mengenai rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai rasio sebesar 96%. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 237.696.699.749,55 dengan target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 246.960.765.850. Pada dasarnya, rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu entitas atau organisasi, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo, berhasil mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks rasio efektivitas, umumnya dianggap bahwa entitas memiliki kinerja yang sangat efektif jika nilai rasio berada di atas 100%. Ini berarti bahwa mereka berhasil melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2020, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo memiliki nilai rasio efektivitas sebesar 96%, yang berarti realisasi pendapatan asli daerah mereka kurang dari 100% dari target yang ditetapkan.

Meskipun nilai rasio ini tidak mencapai tingkat sangat efektif, masih dapat disimpulkan bahwa Dinas tersebut memiliki kinerja yang cukup efektif. Ini menunjukkan bahwa mereka mendekati pencapaian target pendapatan asli daerah, meskipun belum mencapainya sepenuhnya. Evaluasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pendapatan asli daerah tersebut. Upaya perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dan

mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun mendatang.

Top of Form

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang signifikan dalam nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga nilai rasio mencapai 114%. Peningkatan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang berpengaruh.

Pertama, realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021 mencapai Rp. 297.332.050.502,77, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 237.696.699.749,55. Ini menunjukkan bahwa Dinas berhasil meningkatkan pengumpulan pendapatan asli daerah, mungkin melalui peningkatan kepatuhan pajak, pengelolaan sumber daya alam, atau diversifikasi sumber pendapatan lainnya. Kedua, terjadi peningkatan target pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya. Target pendapatan asli daerah pada tahun 2021 mencapai Rp. 260.847.905.850, sedangkan pada tahun sebelumnya targetnya hanya sebesar Rp. 246.960.765.850. Peningkatan target ini mungkin mencerminkan upaya Dinas untuk menghadapi perkembangan kebutuhan dan proyek-proyek yang lebih besar pada tahun tersebut.

Berdasarkan standar rasio efektivitas yang umumnya digunakan, entitas atau organisasi dianggap memiliki kinerja yang sangat efektif jika nilai rasio berada di atas 100%. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2021 dapat dengan yakin dikatakan memiliki kinerja yang sangat efektif, karena mereka berhasil mencapai dan bahkan melampaui target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen dan kemampuan Dinas dalam mengelola pendapatan asli daerah dengan baik, serta berkontribusi positif dalam mendukung program dan proyek pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan ini juga dapat memberikan dorongan positif untuk terus meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah di masa yang akan datang.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan dalam nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga nilai rasio mencapai 78%. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja pendapatan asli daerah.

Pertama, terjadi penurunan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 297.332.050.502,77 menjadi sebesar Rp. 224.834.013.158,28. Penurunan ini menunjukkan bahwa Dinas menghadapi kendala dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut. Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan aktivitas pariwisata, atau penurunan tingkat kepatuhan pajak mungkin berkontribusi terhadap penurunan realisasi pendapatan.

Kedua, terjadi peningkatan target pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 260.847.905.850 menjadi sebesar Rp. 286.498.283.357. Peningkatan target ini mungkin merupakan respons terhadap

kebutuhan yang semakin meningkat atau proyek-proyek pembangunan yang lebih besar yang harus didukung oleh pendapatan daerah.

Berdasarkan standar rasio efektivitas yang umumnya digunakan, entitas atau organisasi dianggap memiliki kinerja yang sangat efektif jika nilai rasio berada di atas 100%. Namun, pada tahun 2022, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo memiliki nilai rasio efektivitas sebesar 78%, yang berarti realisasi pendapatan asli daerah mereka kurang dari 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam menghadapi tantangan ini, Dinas perlu melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi penyebab penurunan pendapatan yang signifikan dan merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan. Upaya perbaikan dapat mencakup meningkatkan kepatuhan pajak, mengoptimalkan sumber pendapatan lainnya, serta menyesuaikan anggaran dengan realitas ekonomi dan kebutuhan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah sehingga Dinas dapat mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam tahun-tahun mendatang.

Hasil penelitian ini jika sama dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2016) yang mengatakan bahwa Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap awal tahunnya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juddy Julian Pilat dan Jenny Morasa, 2017. Judul Penelitian Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015. Berdasarkan perhitungan dan analisis Keuangan Daerah Kinerja dapat disimpulkan bahwa pola hubungan tingkat otonomi daerah di Kota Manado adalah kriteria instruktif. Tingkat Desentralisasi Fiskal masih kurang, tetapi Rasio Efektivitas sangat efektif dan Rasio Efisiensi juga sangat efisien.

4.3.3 Pembahasan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil penelitian tentang rasio efisiensi keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi sebesar 100%. Ini berarti pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang efisien dan seimbang pada tahun tersebut. Rasio efisiensi ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 935.231.843.561,5 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 929.470.743.642,55.

Dalam konteks rasio efisiensi keuangan, umumnya dianggap bahwa pemerintah daerah dianggap efisien jika mendapatkan nilai rasio di bawah 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Dengan demikian, pada tahun 2020, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo masih dalam kategori yang cukup efisien karena nilai rasio efisiensi sebesar 100% yang berarti pengeluaran daerah seimbang dengan pendapatan yang diterima.

Hal ini mencerminkan bahwa Dinas berhasil mengelola anggaran dengan baik dan tidak menghabiskan lebih dari yang diterima. Efisiensi keuangan adalah

faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hal ini dapat menghindari defisit anggaran dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan bijaksana.

Meskipun pada tahun 2020 Dinas ini masih dianggap cukup efisien, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar efisiensi dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam tahun-tahun berikutnya. Upaya untuk meningkatkan penghematan, optimalisasi alokasi anggaran, serta transparansi dalam penggunaan dana publik dapat membantu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga pemerintah daerah dapat terus memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan, nilai rasio efisiensi keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo masih cukup efisien, dengan nilai sebesar 98%. Rasio ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja pemerintah daerah masih efisien karena berada di bawah 100%. Penurunan nilai rasio ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Pertama, terjadi peningkatan pada realisasi belanja daerah dari tahun sebelumnya, naik dari Rp. 935.231.843.561,5 menjadi Rp. 1.017.843.037.745,34. Peningkatan ini mungkin merupakan respons terhadap kebutuhan yang meningkat atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang lebih besar pada tahun tersebut. Kedua, terjadi peningkatan pada realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelumnya, naik dari Rp. 929.470.743.642,55 menjadi Rp.

1.035.735.042.324,77. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Dinas berhasil mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi, atau pendapatan lainnya.

Berdasarkan standar rasio efisiensi keuangan yang umumnya digunakan, pemerintah daerah dianggap efisien jika mendapatkan nilai rasio di bawah 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2021 masih dapat dikategorikan sebagai entitas yang efisien karena nilai rasio efisiensi sebesar 98%.

Meskipun tergolong efisien, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan daerah agar efisiensi dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam tahun-tahun berikutnya. Upaya untuk meningkatkan penghematan, mengelola pengeluaran dengan bijaksana, serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan dapat membantu pemerintah daerah untuk tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, serta memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam nilai rasio efisiensi keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo, dengan nilai rasio mencapai 126%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja anggaran belanja pemerintah daerah pada tahun tersebut dinilai kurang efisien, karena berada jauh di atas 100%. Peningkatan nilai rasio ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Pertama, terjadi peningkatan pada realisasi belanja daerah dari tahun sebelumnya, yang meningkat dari Rp. 1.017.843.037.745,34 menjadi Rp. 1.158.115.117.533,21. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh pelaksanaan proyek-proyek atau program-program yang memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar pada tahun tersebut.

Kedua, terjadi penurunan pada realisasi pendapatan daerah dari tahun sebelumnya, yang turun dari Rp. 1.035.735.042.324,77 menjadi Rp. 915.889.751.815,28. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi atau dampak pandemi yang dapat mengurangi pendapatan daerah.

Berdasarkan standar rasio efisiensi keuangan yang umumnya digunakan, pemerintah daerah dianggap efisien jika mendapatkan nilai rasio di bawah 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo pada tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai entitas yang kurang efisien karena nilai rasio efisiensi sebesar 126%, yang berarti pengeluaran daerah jauh melebihi pendapatan yang diterima.

Penilaian ini dapat menjadi peringatan bagi Dinas untuk melakukan evaluasi lebih mendalam dalam mengelola anggaran dan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau meningkatkan pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah agar sumber daya publik digunakan dengan bijaksana.

Menurut Halim (2016) rasio efisiensi merupakan rasio yang menjelaskan perbandingan antara besar biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan penerimaan bersama realiasasi pendapatan yang akan diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila mendapatkan nilai rasio di bawah dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Makin rendah nilai rasio efisiensi maka kinerja pemerintah daerah semakin membaik. Oleh sebab itu pemerintahan diperlukan perhitungan yang terfokus untuk mengetahui besaran biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan realisasi yang besar agar dapat diketahui kegiatan peningkatan pendapatan yang dilakukan sudah efisien ataukah belum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan perhitungan rasio varians anggaran pendapatan, terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 88%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja pendapatan sebesar 88% dari anggaran yang ditetapkan. Ditahun 2021 nilai rasio mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi seniai 101%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja pendapatan sebesar 101% dari anggaran yang ditetapkan. Dan ditahun 2022 rasio yang diperoleh mengalami penurunan menjadi sebesar 93% artinya pemerintah daerah memiliki kinerja pendapatan sebesar 93% dari anggaran yang ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan rasio varians pendapatan ini belum dapat dikatakan baik.
2. Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas, terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 96%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja efektifitas pelaksanaan anggaran yang kurang efektif, seanjutnya ditahun 2021 nilai rasio mengalami peningkatan menjadi 114% artinya pemerintah daerah memiliki kinerja efektifitas pelaksanaan anggaran yang sangat efektif, dan ditahun 2022 nilai rasio kembali mengalami penurunan menjadi 78% artinya pemerintah daerah memiliki kinerja efektifitas pelaksanaan anggaran yang kurang efektif. Sebagaimana dikatahui bahwa standar rasio efektivitas pemerintah daerah dikatakan baik apabila memiliki nilai rasio diatas 100%,

maka secara keseluruhan kinerja efektifitas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo dikatakan belum efektif.

3. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi, terlihat bahwa pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 100%, artinya pemerintah daerah memiliki kinerja efisien yang berimbang, seanjutnya ditahun 2021 nilai rasio mengalami penurunan menjadi 98% artinya kinerja anggaran belanja pemerintah daerah dinilai efisien karena berada dibawah 100%, namun ditahun 2022 nilai rasio mengalami peningkatan menjadi 126% artinya kinerja anggaran belanja pemerintah daerah dinilai kurang efisien karena berada jauh diatas 100%. Maka secara keseluruhan rasio efisiensi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo dikatakan belum efisien.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah

1. Bagi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo disarankan agar lebih menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar PAD yang besar bisa mengukangi ketergantungan anggaran dari pusat maupun daerah serta bisa meningkatkan kemandirian keuangan. Selain itu diharapkan bisa memperhatikan keserasian belanja agar belanja yang dikeluarkan dapat lebih mengembangkan kualitas pariwisata yang berada di Kota Gorontalo.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian tentang potensi Pendapatan Asli Daerah, sebab Kota Gorontalo adalah daerah yang besar yang mempunyai potensi untuk mengembangkan Kota Gorontalo menjadi kota pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Anf, Sugiono dan Edy, Untung. 2008. *Panduan Praktis dan Dasar Analisis Laporan Keuangan*, Grasido, Jakarta.
- Bridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyususan Prosedur dan Metode*, Edisi Kelima, Badan Penerangan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Darsono dan Ashari, 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Andi, Yogyakarta.
- Erfans, 2010. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*, Jakarta : PT. Ercontara Rajawali.
- Fahmi, Irham.2003. *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung. Alfabeta.
- Fraser, Lyn M. dan Aileen Ormiston. 2008. *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi Ketujuh, Jakarta. Indeksi (Terjemahan)
- Gesita Harahap. 2011. *Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alata Ukur Efektifitas Kinerja KeuanganPada Pt. Buana Estate Cabang Medan*. Universitas Sumatra Utara
- Giri, Ferdinand Efrain. 2010. *Pengaruh Tenure Kantor Akuntan Publik Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit*. Kasus Rotasi Wajib Auditor Di Indonesia Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Harahap. Sofyan Safry. 2004. *Akuntansi aktiva Teta*, Edisi ketiga. Jakarta : Penerbit PT> Raja Grafido.
-, 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Safry. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hery, 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Ikatan KAuntansi Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Laporan Arus Kas (Revisi 2009)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir, 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
-, 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
-, 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Moham. 2005. *Bank Syariah Problemdan Proses Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
-, 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Munawir, 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta Liberty.
- Santoso, singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT. Alex Media Lomputindo.
- Sawir, Agnes. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Setiawan, hengky. 2000. *Analisis Rasio Arus Kas Pada Perusahaan Kelompok Industri Semen*. Universitas Widyatama.
- Simamora, Henry. 2000. *Manajemen Pemasaran Internasional*, Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Suherli, Michell. 2006. *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang*, Edisi Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sundjaja dan Barlian. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Syahputra, Frgi. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Laporan Arus Kas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Weahantouw Tinangan. 2015. *Analisis Laporan Arus Kas koperasi, Instansi dan Pendanaan pada PT Gudang garam Tbk*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1899/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2022

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo
di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Herlin Y.D. Antuli
NIM : E1116113
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS RASIO PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

Jln. Drs. Achmad Nadjamuddin No. 106 Telp/Fax 0435-822579 Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/disparpora/ /VI/2023

Inspektor Provinsi Gorontalo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Herlin Y. D Antuli**
NIM : **E1116113**
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul Analisis Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selama 3(tiga) bulan sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 9 Juni 2023 di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 9 Juni 2023



Effendy SJ. Rauf, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660605 199903 1 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI
SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 169/SRP/FE-UNISAN/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 092811690103
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Herlina Y. D Antuli
NIM : E1116113
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Rasio Pendapatan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 9%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 15 September 2023
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir : Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Tunitin SKRIPSI Helin.docx

AUTHOR

HERLIN ANTULI

WORD COUNT

6615 Words

CHARACTER COUNT

46053 Characters

PAGE COUNT

45 Pages

FILE SIZE

298.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 22, 2023 11:53 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 22, 2023 11:54 PM GMT+8

● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Herlin Y.D Antuli (E11.16.113). Lahir di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo 31 Desember 1996. Penulis merupakan anak Tunggal dari Bapak Alm. Yunus Datau dan Ibu Asna Yusuf .Menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Pilomonu masuk pada tahun 2003 lulus pada tahun 2009, pada tahun 2009 masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP N 2 Mootilango) dan lulus pada tahun 2012, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Atas (SMN 1 Boliohuto) dan lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta sejak tahun 2016 dan terdaftar sebagai mahasiswa tepatnya di Universitas Ichsan Gorontalo (UIG). Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Selain sebagai mahasiswa penulis juga pernah tergabung dalam anggota BEM Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan. Selain itu penulis juga merupakan salah satu kader paguyuban AMPKPRG dan IPMBRG.